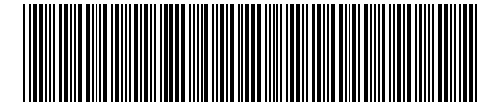




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099550/2018**



DS:0694-7322-3706-5290

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG  |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM                          |
| 3. Provinsi                   | : (19)     | SULAWESI SELATAN  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (099550) | PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG                                     |
| Sebesar                       | : Rp.      | 90.310.000 ( SEMBILAN PULUH JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	90.310.000
Rp.	90.310.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	90.310.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN WATAMPONE | (055) Rp. | 90.310.000 |
|-------------------|-----------|------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0694-7322-3706-5290

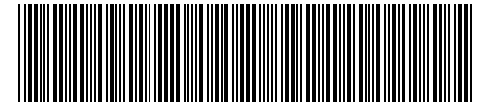
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099550) PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMIRUDDIN, SH.  
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD ABRAR  
Pejabat Penanda Tangan SPM : ASYARIAH HAMZAH, SE.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		90.310.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		90.310.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		90.310.000
Sasaran Program	01	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
Indikator Kinerja Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124091 Perkara	
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	106767 Jam Layanan	
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum	2000 Orang	
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	80 Orang	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum		
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	142485 Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482 Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	95600 Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	55665 Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	700 Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2000 Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		90.310.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum		
	02	Pos bantuan hukum		
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung		
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu		
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	312,00 Jam Layanan	31.200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	108675 Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	100,00 Perkara	58.320.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	- Perkara	
	02	Pembinaan dan Pemeriksaan	- Satker	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099550) PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMIRUDDIN, SH.  
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD ABRAR  
Pejabat Penanda Tangan SPM : ASYARIAH HAMZAH, SE.

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	03	Honor Operator SAI/BMN Tingkat Korwil	- Orang	
Output Kegiatan	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00 Perkara	790.000
Indikator Output Kegiatan	01	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	873,00 Perkara	

Jakarta, 05 Desember 2017  
Direktur Jenderal Badilum

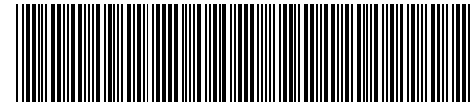
ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (099550) PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	90.310.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	90.310.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099550) PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG  
Kewenangan : (KD)

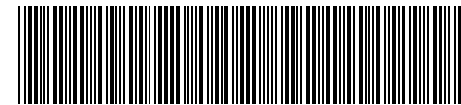
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	-	90.310	-	-	-	90.310		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	90.310	-	-	-	90.310		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	90.310	-	-	-	90.310		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	31.200	-	-	-	31.200	19 . 19	
01	RM	-	31.200	-	-	-	31.200	055	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	58.320	-	-	-	58.320	19 . 19	
01	RM	-	58.320	-	-	-	58.320	055	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	790	-	-	-	790	19 . 19	
01	RM	-	790	-	-	-	790	055	
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>90.310</b>	-	-	-	<b>90.310</b>		

Jakarta, 05 Desember 2017  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (099550) PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

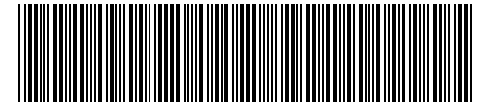
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099550	<b>PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	831	1.842	3.233	4.949	5.202	5.780	10.033	9.763	10.584	10.801	12.093	15.199	90.310
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	831	1.842	3.233	4.949	5.202	5.780	10.033	9.763	10.584	10.801	12.093	15.199	90.310
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	831	1.842	3.233	4.949	5.202	5.780	10.033	9.763	10.584	10.801	12.093	15.199	90.310
		52 BELANJA BARANG	831	1.842	3.233	4.949	5.202	5.780	10.033	9.763	10.584	10.801	12.093	15.199	90.310

Jakarta, 05 Desember 2017  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
IV A. B L O K I R**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [099550] PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099550/2018  
IV B. C A T A T A N**



DS:0694-7322-3706-5290

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [099550] PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Dr. Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004